

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sudah menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan standar yang ditetapkan pada PP No. 71 Tahun 2010 namun masih dalam proses belajar. Kesiapan apabila dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) masuk dalam kategori cukup siap untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Hal ini juga berlaku pada kesiapan sistem informasi yang juga masuk dalam kategori cukup siap. Kategori siap terdapat pada regulasi-regulasi yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dikeluarkan oleh pihak terkait untuk kelancaran penerapan tersebut.
2. Kendala dan hambatan lain yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur antara lain, kurangnya pegawai staf keuangan yang bukan berasal dari latar belakang akuntansi, sistem informasi yang masih manual dan belum terotomatisasi berdampak pada penerapan akuntansi akrual, kurangnya bimbingan teknik berupa pendampingan akademisi yang dirasa sangat membantu bagi pegawai.

Tabel 4.8

Kesimpulan Kesiapan SKPD

Kesiapan	Kategori
Sumber daya Manusia	Cukup Siap
Sistem Informasi	Cukup Siap
Regulasi	Siap

Sumber : Data Olahan 2015

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis dan kesimpulan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Perlunya perekrutan yang didasarkan pada keahlian dan kemampuan yang dimiliki serta adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang akuntansi atau administrasi negara sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan tugas-tugas keuangan dan mampu beradaptasi langsung terhadap perubahan basis akuntansi seperti sekarang ini.
2. Pemerintah Daerah harus segera menyusun bentuk yang tetap mengenai akuntansi akrual ini sehingga tidak dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dikemudian hari. Sistem informasi juga harus segera dilakukan *droping* ke SKPD-SKPD dibawahnya termasuk Dinas PU Bina Marga.
3. Perlu adanya pendampingan yang instens berupa bimbingan teknis maupun teknologi dari akademisi baik akuntan BPKP maupun konsultan lainnya sehingga aplikasi untuk akuntansi berbasis akrual dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan asistensi secara intensif.